

**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PADA
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)
DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

SKRIPSI

*Diajukan kepada tim penguji skripsi Program Studi Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh
gelar Sarjana Kependidikan (S1)*



Oleh:

**AFDHANIL HUSNI
TM/NIM : 2007/89264**

**PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN**

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2012**

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

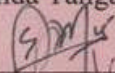
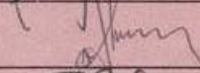

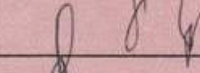

Pada hari Selasa 24 Januari 2012 Pukul 10.10 s/d 11.00 WIB

Pemberdayaan Perempuan Pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kabupaten Padang Pariaman

Nama : Afdhanil Husni
TM/NIM : 2007/89264
Program studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 24 Januari 2012

Tim Penguji:

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Drs. Al Rafni, M.Si	
Sekretaris	: Lince Magriasti, S.IP. M.Si	
Anggota	: Dra. Hj. Aina	
Anggota	: Drs. Suryanef, M.Si	
Anggota	: Dra. Hj. Maria Montessori, M.Ed. M.Si	

Mengesahkan:
Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 198903 1 002

ABSTRAK

Afdhanil Husni 2007/89264. Pemberdayaan Perempuan pada Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Padang Pariaman.

Penelitian ini dilatar belakangi kurangnya keterwakilan perempuan pada partai Keadilan Sejahtera di lembaga legislatif. Hal ini dapat dilihat pada periode 2009-2014, jumlah perempuan yang duduk hanya 1 orang dari 4 orang anggota DPRD PKS. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi upaya-upaya pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera dan hambatan-hambatan yang ditemui partai dalam melakukan upaya pemberdayaan pada kader partainya di Kabupaten Padang Pariaman.

Untuk menjawab persoalan tersebut, maka peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan informasi dari beberapa informan melalui wawancara dengan kader PKS, anggota legislatif PKS dan pengurus PKS dengan menggunakan pedoman wawancara, kertas kerja, dan alat-alat yang diperlukan dalam penelitian kemudian uji keabsahan data dilakukan melalui teknik triangulasi, sumber data, teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan yang dilakukan PKS sudah berjalan dengan cukup baik. Namun ada hambatan-hambatan yang ditemui PKS untuk memberdayakan perempuan. Upaya yang dilakukan PKS untuk kader perempuan terlihat dari perencanaan dan pelaksanaan programnya. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan perempuan pada Partai Keadilan Sejahtera belum berjalan dengan optimal. Melalui penelitian ini disarankan agar parpol dapat melaksanakan program yang telah direncanakan, dengan lebih memperhatikan pelaksanaannya dan hambatan-hambatan yang ditemui oleh perempuan.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT berkat rahmat dan karunianya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemberdayaan Perempuan Pada Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Padang Pariaman”.

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Selama proses penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak masukan berupa motivasi, bantuan, bimbingan, saran dan arahan dari berbagai pihak untuk itu pada kesempatan itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd yang telah memberikan izin dan kemudahan dalam pelaksanaan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Drs. M Fachri Adnan, MSi, Ph.D selaku ketua dan ibu Henny Muchtar, SH. M.Hum sekretaris Jurusan Ilmu Sosial Poltik yang telah memberikan izin kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
3. Ibu Dra. Al Rafni selaku pembimbing I yang penuh kesabaran dalam membimbing dan memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

4. Ibu Lince Magriasti, S.IP.M.Si selaku pembimbing II yang penuh kesabaran dalam membimbing dan memberi motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dra. Aina, Bapak Drs. Suryanef, M.Si, beserta ibu Dra. Maria Montessori, M.Ed, M.Si. selaku anggota tim penguji yang telah memberikan banyak masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.
6. Ibu Dra. Al Rafni, M.Si selaku penasehat akademis yang memberikan berbagai macam nasehat selama perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu staf pengajar Jurusan Ilmu Sosial Politik yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama perkuliahan.
8. Bapak kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Bapak Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Bapak DPD PKS dan jajaranya yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
9. Teristimewa kepada orang tua atas doa dan semangat yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua rekan-rekan mahasiswa yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa banyak terdapat berbagai kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu kiranya kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihaklah yang dapat memperbaiki karya penulis di

masa yang akan datang. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua terutama bagi penulis. Amin.

Padang, Januari 2012

Penulis.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR BAGAN	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah, Pembatasan, dan Rumusan Masalah.....	10
C. Fokus Penelitian	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Kajian Teoritis	13
1. Pemberdayaan Perempuan Dalam Politik	13
a. Konsep Pemberdayaan Perempuan.....	13
b. Pemberdayaan Perempuan dan Politik	26
2. Kaderisasi dalam Partai Politik	31
3. Hambatan-hambatan yang Ditemui dalam Melakukan Upaya Pemberdayaan Perempuan di Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Padang Pariaman.....	36
B. Kerangka Konseptual.....	39
BAB III METODELOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Informan Penelitian.....	41

D. Jenis dan Sumber Data, Teknik dan Pengumpulan Data	42
E. Uji Keabsahan Data	44
F. Teknik Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan Umum	47
B. Temuan Khusus	56
1. Upaya Pemberdayaan Perempuan Pada Partai Keadilan Sejahtera	56
2. Hambatan-hambatan yang Ditemui dalam Melakukan Upaya Pemberdayaan Perempuan Pada PKS	70
C. Pembahasan dan Analisis	75
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	104
B. Saran	105
DAFTAR KEPUSTAKAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Anggota Terpilih DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Pemilu 2009 se Provinsi Sumatera Barat.....	3
Tabel 3.1 Nama Informan Penelitian.....	42
Tabel 4.1 Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	52
Tabel 4.2 Karakteristik Informan Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Padang Pariaman.....	53
Tabel 4.3 Daftar calon anggota legislatif Partai Keadilan Sejahtera Pemilu 2009. Daerah pemilihan I.....	53
Tabel 4.4 Daftar Calon Anggota Legislatif Partai Keadilan Sejahtera Pemilu 2009. Daerah pemilihan II	54
Tabel 4.5 Daftar Calon Anggota Legislatif Partai Keadilan Sejahtera pemilu 2009. Daerah pemilihan III	54
Tabel 4.6 Daftar Calon Anggota Legislatif Partai Keadilan Sejahtera pemilu 2009. Daerah pemilihan IV	55
Tabel 4.7 Daftar Terpilih Anggota DPRD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kab/Kota Pemilu Tahun 2009 Kabupaten Padang Pariaman dari Daerah Pemilihan I sampai IV	55

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Konseptual.....	39
------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Pedoman wawancara.
- Lampiran 2. Surat izin melakukan penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Negeri Padang.
- Lampiran 3. Surat izin melakukan penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman
- Lampiran 4. Surat keterangan telah melakukan penelitian dari DPD PKS Kabupaten Padang Pariaman
- Lampiran 5. Surat keterangan telah melakukan penelitian dari KPUD Kabupaten Padang Pariaman.
- Lampiran 6. Program Kerja Bidang Perempuan PKS Kabupaten Padang Pariaman.
- Lampiran 7. Struktur Dewan Pengurus Daerah PKS Kabupaten Padang Pariaman.

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran perempuan di tanah air telah dimulai sejak zaman penjajahan. Munculnya tokoh perempuan Indonesia seperti R.A Kartini, R Dewi Kartika Cut Nyak Dien, Rasuna Said, Rohana Kudus, Siti Manggopoh dan Tuanku Nan Renceh dapat menjadi contoh. Harus diakui bahwa meski sudah banyak tokoh perempuan yang sukses, namun pada sisi lain masih banyak pula hambatan yang dialami kaum perempuan untuk tampil dalam sektor publik, misalnya yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dalam partai politik.

Pemberdayaan merupakan konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan barat, utamanya Eropa. Konsep pemberdayaan telah diterima secara meluas dan dipergunakan dalam banyak kegiatan pembangunan. Konteks lahirnya konsep pemberdayaan masyarakat adalah sebagai jawaban teori-teori sosial dalam pembangunan yang tidak berpihak kepada kaum lemah, tidak berdaya dan kaum perempuan.

Bergulirnya reformasi politik membawa angin segar bagi kiprah perempuan di dunia politik. Reformasi yang dialami bangsa Indonesia pada tahun 1998 membawa perubahan pada sistem politik termasuk sistem pemilu. Banyak kebijakan yang berpihak pada perempuan, salah satunya kebijakan kuota dalam pencalonan anggota legislatif dari partai dan kebijakan suara terbanyak dalam perhitungan perolehan kursi di parlemen.

Lois (2007:5) mengemukakan bahwa eksekutif perempuan mempunyai kecenderungan alami yang lebih besar untuk melaksanakan beberapa pekerjaan sekaligus dengan nyaman. Hal ini tentu saja menisyaratkan bahwa perempuan memiliki kelebihan dalam kepemimpinannya. Akan tetapi perempuan dalam birokrasi sering kali mendapat persepsi tajam dari masyarakat baik positif maupun negatif. Hal ini sering dibicarakan dalam persoalan gender, bahwa tidak banyak perempuan yang menjadi kader untuk ikut menjadi pemimpin atau setidaknya duduk pada posisi strategis dalam partai politik.

Sepanjang sejarah, komposisi perempuan dalam dunia politik masih sangat rendah. Salah satu bukti dengan sedikitnya jumlah perempuan di parlemen. Berdasarkan fakta yang diperoleh internasional IDEA tahun 2002, parlemen menduduki hanya 14,3% dari keseluruhan anggota parlemen. Negara-negara Skandinavia (Swedia, Norwegia, dan Denmark) memiliki tingkat keterwakilan perempuan yang paling tinggi, yaitu mencapai 40%, sedangkan jumlah terendah diduduki oleh negara-negara Arab sekitar 4,6% (AIRafni, 2006:2).

Jumlah keterlibatan perempuan yang sedikit juga dapat dilihat pada lembaga politik di Indonesia tahun 2004. Di MPR hanya 18 orang dari 195 orang. DPR 45 dari 500 orang, lembaga eksekutif seperti Bupati 5 orang dari 336 orang. Sedangkan untuk jabatan Gubernur hanya ada satu perempuan, dan lembaga yudikatif seperti Mahkamah Agung 7 orang dari 47 orang, Hakim 536 orang dari 2775 orang. Sedangkan di luar lembaga yang disebutkan di atas seperti DPA 2 orang dari 45 orang, KPU 2 orang dari 11 orang (Soetjipto, 2005:63).

Sementara itu di partai politik sedikitnya keterlibatan perempuan tidak hanya pada tataran Nasional tetapi di daerah pun tidak jauh berbeda, baik ditingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota. Sebagai contoh pada pemilu 2004 jumlah kuota 30% perempuan di lembaga legislatif daerah belum terpenuhi keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif di DPRD Sumatera Barat sebanyak 5 orang (9,09%) dari 55 anggota legislatif (Al Rafni, 2006:2).

Bila ditelusuri lebih lanjut pada pemilu 2009 misalnya adanya kebijakan kuota tidak serta menguatkan keterwakilan perempuan di Lembaga legislatif. Berdasarkan hasil pemilu 2009 dapat digambarkan jumlah keterwakilan perempuan di Lembaga legislatif sebagai berikut.

Tabel 1.1
Daftar Anggota Terpilih DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Pemilu 2009
Se Provinsi Sumatera Barat.

No	DPR Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota	Jumlah		Perolehan kursi per-jenis kelamin			% Perempuan
		Dapil	Kursi	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	DPRD Provinsi Sumatera Barat	5	55	48	7	55	12.73%
2	DPRD Kab.Kep Mentawai	3	20	20	-	20	0.00%
3	DPRD Kota Padang	5	45	42	3	45	5.67
4	DPRD Kab Pesisir Selatan	5	40	40	-	40	0.00%
5	DPRD Kab. Solok Selatan	3	25	23	2	25	8.00%
6	DPRD Kab.Solok	4	35	34	1	35	2.86%
7	DPRD Kota Solok	2	20	19	1	20	5.00%
8	DPRD Kab Dharmasraya	3	25	24	1	25	4.00%
9	DPRD Kab Sijunjung	3	25	23	2	25	8.00%
10	DPRD Kota Sawah Lunto	3	20	16	4	20	20%
11	DPRD Kab Tanah Datar	4	35	32	3	35	8.57%
12	DPRD Kota Padang Panjang	2	20	16	4	20	20%
13	DPRD Kab Padang Pariaman	4	35	32	3	35	8.57%
14	DPRD Kota Pariaman	3	20	19	2	20	5.00%
15	DPRD Kab Agam	5	40	37	3	40	7.50%
16	DPRD Kota Bukittinggi	2	25	21	4	25	16%
17	DPRD Kab Pasaman	3	30	29	1	30	3.33%
18	DPRD Kab Pasaman Barat	4	35	34	1	35	2.86%
19	DPRD Kab Limapuluh Kota	5	25	23	2	25	8.71%
20	DPRD Kota Payakumbuh	3	25	23	2	25	8.00%
Jumlah		71	610	565	45	610	7.38%

Sumber : KPU Sumbar 2010

Dari data di atas dapat diketahui bahwa komposisi kursi yang diduduki oleh perempuan belum mencapai 30%. Rendahnya keterwakilan perempuan dalam bidang politik jika dicari akar permasalahannya dapat dikategorikan kedalam dua faktor, yaitu faktor internal yang melekat pada diri perempuan itu sendiri seperti perempuan yang harus mengalami masa hamil, masa haid, kurang percaya diri yang dimiliki oleh perempuan dan kurangnya perempuan memperoleh pendidikan. Sedangkan faktor eksternal yaitu di luar diri perempuan itu sendiri, diantaranya dalam keluarga yang selalu mengutamakan laki-laki. Begitu juga dalam masyarakat yang memandang perempuan hanya melakukan aktifitas di rumah. Salah satu faktor diluar dari diri perempuan yang sangat berpengaruh dalam menentukan keterwakilan perempuan dalam politik adalah faktor struktur dan sistem politik dimana perempuan tersebut berinteraksi dengan dunia politik. Dengan kata lain intensitas keterlibatan perempuan dalam dunia politik sangat diwarnai dengan perpolitikan satu negara dalam satu masa kurun waktu (AlRafni, 2006:2).

Walaupun tindakan “*affirmative action*” pada akhirnya dieliminasi dengan keluarnya Keputusan Mahkamah Konstitusi No 24/puu-4/2000 yaitu penghapusan sistem nomor urut dan menggunakan suara terbanyak sebagai penentuan anggota Legislatif. Namun, perjuangan perempuan terus berlanjut kesemuanya bermuara pada peningkatan kesempatan perempuan untuk berjuang didalam politik. Salah satu strategi untuk pencapaian tersebut adalah diperlukan upaya serius bagi parpol untuk mewujudkan kader-kader perempuan yang lebih berkualitas.

Istilah kader berasal dari bahasa Inggris *Cadre*, yaitu sebutan yang diberikan kepada seseorang yang kena berbagai kelebihan atau potensi yang dimilikinya dipandang mampu sebagai kandidat untuk memegang jabatan penting atau strategi dimasa mendatang. Kaderisasi merupakan suatu merekrut anggota masyarakat melalui jaringan latihan atau pendidikan tertentu yang dilakukan oleh departemem pemerintah, instansi swasta, organisasi politik maupun organisasi kemasyarakatan. Dapat dipahami bahwa kaderisasi dilakukan untuk menyambung kelangsungan hidup suatu organisasi, individu yang direkrut sesuai dengan kepentingan organisasi yang bersangkutan seperti pengkaderan yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kabupaten Padang Pariaman.

Koirudin (2004:113) dalam bukunya partai politik dan agenda transisi demokrasi juga dijelaskan bahwa “kaderisasi merupakan proses penyiapan SDM agar kelak mereka menjadi para pemimpin yang mampu membangun peran dan fungsi organisasi secara lebih bagus”. Dia juga menambahkan bahwa ada dua persoalan dalam pengkaderan, yaitu:

1. Bagaimana usaha-usaha yang dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkan kemampuan baik keterampilan maupun pengetahuan.
2. Kemampuan untuk menyediakan stok kader atau SDM organisasi dan terutama dikhususkan pada kaum muda.

Peran kader partai politik sangat vital untuk membangun suatu kepemimpinan partai politik yang berkualitas. Untuk menentukan wajah partai ke depan sangat ditentukan oleh kualitas kader-kader yang dimilikinya. Partai

politik merupakan embrio demokrasi perwakilan modern, melalui sistem demokrasi partai politik menampung berbagai aspirasi dan kepentingan yang berkembang di masyarakat untuk dapat diartikulasikan menjadi sebuah kebijakan. Selain itu partai politik juga berfungsi sebagai agen untuk memproduksi kader-kader pemimpin bangsa.

Pada penelitian ini pemberdayaan perempuan yang dicermati adalah pada Partai Keadilan Sejahtera. Partai Keadilan Sejahtera merupakan partai yang cukup besar pengaruhnya di Kabupaten Padang Pariaman. Kriteria untuk calon legislatif perempuan dan laki-laki ditetapkan sama, pengkaderan terhadap anggota perempuan dilakukan secara terus menerus. Caleg-caleg PKS sebelumnya telah terlibat dalam kegiatan-kegiatan PKS. Di Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS ada Bidang Kaderisasi. Kaderisasi ini merupakan salah satu yang merekomendasikan nama-nama kader yang layak untuk dilakukan sebagai caleg.

Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan peneliti dengan Bapak Budiman, Lc selaku pengurus Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 12 Agustus 2011 menyatakan bahwa Kepengurusan DPP Partai Keadilan Sejahtera(PKS) terdiri dari Dewan Syariah, Majelis Pertimbangan Partai dan Pimpinan Harian Pusat. Mayoritas aktivis dari simpatisan PKS adalah wanita yang masing-masing duduk didalam Majelis Pertimbangan Partai, Ketua Bidang Kewanitaan, Ketua Departemen dan Ketua Jaringan Lembaga.

Program-program bidang kewanitaan PKS mengadakan pendidikan politik bagi kader simpatisannya dengan program peningkatan kesadaran dan keterampilan politik perempuan melalui ceramah, seminar, pelatihan, workshop, demonstrasi dan pendidikan politik bagi keluarga. Selain itu juga PKS menyiapkan kemampuan politik melalui kampanye, pelatihan *capacity building*, seminar UU pemilu, pelatihan publik.

Dalam struktur Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Padang Pariaman Periode 2010-2011 diketuai oleh Budiman, Lc dengan wakilnya Herizal Lazran. Sekretaris yaitu Salmi dan Bendahara Nurmaini, S.Pd. Ada beberapa bidang kegiatan dalam Dewan pengurus daerah Partai Keadilan Sejahtera yang dilakukannya. *Pertama*, Bidang Kaderisasi yang diketuai oleh Andriani. Yaitu bagaimana proses penyiapan SDM agar kelak mereka menjadi para pemimpin yang mampu membangun peran dan fungsi organisasi secara lebih bagus. *Kedua*, Bidang Pembangunan Umat yang diketuai oleh Dewi Rini. Yaitu pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia baik yang bersifat *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), ataupun *tahsiniyyat* (tersier) selalu dipandang sebagai tujuan penting dalam sebuah pembangunan.

Ketiga, Bidang Kebijakan Public yang diketuai oleh Zaitun S.Pd. Yaitu Islam memandang kemanusiaan sebagai suatu keluarga besar yang berserikat dan merupakan bagian dari kesatuan yang universal. Nilai-nilai kemanusiaan sebagai makhluk social terletak dalam keanggotaanya dalam masyarakat dan diukur sejauhmana ia memberi kontribusi terhadap kehidupan masyarakat.

Keempat, Bidang Pemberdayaan Perempuan yang diketuai oleh Andila. Yaitu dalam bingkai taqwa mewujudkan perempuan Indonesia secara cerdas, sejahtera, cerdas, berdaya dan berbudaya melalui supaya mengefektifkan kerja lembaga Legislative, Eksekutif dan Yudikatif dalam pemberdayaan perempuan.

Kelima, Bidang Generasi Muda dan Profesi yang diketuai oleh Aldino Desra, S.farm yaitu membina pemuda sebagai pilar pembangunan bangsa dalam mengatasi masalah social dan moral serta menjadikan kaum muda yang mandiri, berdaya dan mempersiapkannya sebagai calon pemimpin bangsa.

Keenam, Bidang Kepanduan dan Olah Raga yang diketuai oleh Jon Henri. Yaitu membangun manusia Indonesia yang kuat jasmani dan menumbuhkan karakter kepemimpinan, kerja keras, disiplin, kerja sama, sportif melalui aktifitas olah raga. *Ketujuh*, Bidang Pembinaan Cabang Dakwah yang diketuai oleh Iskandar Bustami. Yaitu menempatkan dakwah sebagai proses penyucian diri manusia sebagai fitrahnya dan menjamin kebebasan setiap pemeluk agama untuk menjalankan ajarannya masing-masing. Dengan sikap saling menghormati. *Kedelapan*, Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Kewirausahaan yang diketuai oleh Efrizul, S.Pt. yaitu membangun sector riil yang kuat dan berdaya demi mengangkat derajat hidup rakyat yang terpingkirkan terutama kaum tani, buruh, nelayan, buruh dan pedagang kecil serta kelompok yang berada di bawah garis kemiskinan, mengembangkan usaha mandiri, pembentukan balai latihan kerja dan pemantapan lembaga keuangan syariah sebagai alternatif solusi.

Dilihat dari keanggotaan struktur Keadilan Sejahtera terlihat adanya peran serta perempuan yang menduduki posisi kepengurusan. Adanya pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera dapat meningkatkan keterlibatan perempuan pada partai politik dalam anggota legislatif.

Wanita PKS melalui forum-forum pengajian menyampaikan perlunya membiasakan perilaku Islami dalam keseharian maupun dalam berpolitik, seperti dalam berdemonstrasi yang dilakukan dengan damai dan tertib. Selain itu, melakukan kegiatan sosial yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat seperti bazar murah dan kotak infak. Upaya-upaya yang dilakukan dalam pemberdayaan perempuan juga dilakukan oleh partai lain. Partai Amanat Nasional (PAN) misalnya, memiliki mekanisme rekrutmen yang berbeda khususnya rekrutmen terhadap calon anggota legislatif perempuan. Berdasarkan kepada UU Nomor 10 tahun 2008 tentang pemilu PAN membuat berupa keputusan internal partai terkait dengan hal tersebut, bagaimana tata cara melakukan rekrutmen calon anggota legislatif perempuan. Di mulai dari ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai sampai dengan keputusan partai tingkat DPD, DPW dan DPP.

Masing-masing tingkatan tersebut membentuk tim rekrutmen yang disebut dengan Tim Pencalegkan Dini. Dalam pencalegkan dini diupayakan agar kuota keterwakilan perempuan itu dipenuhi. Maka tiap melakukan sosialisasi ke masyarakat melalui media massa, misalnya radio dan atribut-atribut dan spanduk mengenai penjaringan caleg khususnya perempuan yang berminat untuk mencaleg melalui PAN dengan persyaratan yang ditentukan.

Namun dalam proses penjaringan oleh tim memang diprioritaskan dari kader. Hal ini dengan pertimbangan dengan kader itu telah memiliki pengalaman dalam berorganisasi. Kader setidaknya telah memahami dan ikut serta dalam pengambilan keputusan, tugas-tugas partai dan kegiatan kemasyarakatan. Dari latar belakang di atas, penulis tertarik meneliti bagaimana upaya-upaya pemberdayaan perempuan kader partai yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kabupaten Padang Pariaman.

B. Identifikasi Masalah, Pembatasan, dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat diidentifikasi masalah yang berkaitan dengan masalah pokok yaitu:

- a. Peran perempuan dalam Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Padang Pariaman menghadapi kendala struktural maupun kultural.
- b. Jumlah perempuan diparlemen tidak bisa dilepaskan dengan upaya peningkatan kualitas perempuan itu sendiri.
- c. Adanya kebijakan kuota 30% tidak mempengaruhi pengkaderan perempuan pada Partai Keadilan Sejahtera di lembaga legislatif.

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis memberikan batasan masalah tentang "Pemberdayaan Perempuan pada Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Padang Pariaman".

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana upaya pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Padang Pariaman dalam mewujudkan kader partai yang berkualitas?
- b. Apakah hambatan-hambatan yang ditemui dalam melakukan upaya pemberdayaan perempuan di Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Padang Pariaman?

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah

1. Dengan adanya pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Padang Pariaman dapat mewujudkan kader partai yang berkualitas.
2. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam melakukan upaya pemberdayaan perempuan di Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Padang Pariaman.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Padang Pariaman.

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui dalam melakukan upaya pemberdayaan perempuan di Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Padang Pariaman.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Untuk memperkaya ilmu pengetahuan di bidang Ilmu politik dan Pendidikan Politik.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada pemerintah agar lebih memberikan peluang dan kesempatan kepada perempuan untuk menjadi kader dalam partai politik.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan pembahasan peneliti di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan perempuan pada Partai Keadilan Sejahtera sudah terencana dengan baik, namun dalam kenyataannya belum terlaksana secara optimal. Di Kabupaten Padang Pariaman pemberdayaan perempuan pada Partai Keadilan Sejahtera terlihat dari keterwakilan perempuan dilembaga legislatif. Bahwa hanya ada 1 yang terpilih dari 4 anggota legislatif. Dari presentase di atas dapat kita lihat bahwa adanya perencanaan dan program serta amanat UU No 2 Tahun 2008 tentang partai politik dan UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilu untuk memberdayakan perempuan masih kurang. Namun, sudah ada usaha-usaha dari parpol PKS untuk memberdayakan perempuan untuk duduk di lembaga legislatif agar dapat tercapai dengan baik.

Usaha yang dilakukan PKS untuk memberdayakan kader perempuan untuk duduk dilembaga legislatif yaitu adanya perencanaan program dan pelaksanaan program. Hambatan perempuan pada PKS di lembaga legislatif dipengaruhi oleh beberapa faktor: yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dari faktor internal dapat dilihat beberapa hambatan untuk pemberdayaan perempuan pada Partai Keadilan Sejahtera yaitu keterbatasan waktu perempuan. Hal ini dikarenakan secara kodrat perempuan sebagai istri dan ibu bagi anak-anaknya. Selain itu perempuan juga harus bekerja membantu

keluarga memenuhi kebutuhan keluarga. Setelah itu kemiskinan perempuan dalam segi dana, karena untuk melakukan kegiatan tentunya diperlukan dana agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar.

Faktor eksternal perempuan yang menghambat Pemberdayaan perempuan pada Partai Keadilan Sejahtera yaitu hambatan sosial budaya masyarakat yang masih memandang bahwa tugas pokok perempuan adalah mengurus rumah tangga, dan yang bertugas dibidang publik atau di luar rumah adalah laki-laki sebagai kepala keluarga. Selain itu persepsi masyarakat yang masih janggal melihat perempuan berkecimpung di dunia politik dan ada pandangan ketidakpercayaan masyarakat kepada partai politik terhadap perempuan dalam memimpin.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan pembahasan di atas, maka dapat peneliti sarankan

1. Bagi perempuan, melalui kesempatan ini peneliti menyarankan: *pertama*, perempuan juga harus mendorong dan menyadari bahwa peluang bagi perempuan untuk ikut dalam kancah politik sangat besar, karena aturan perundang-undangan seperti undang-undang tentang parpol dan pemilu telah memberikan kesempatan besar bagi perempuan untuk berpolitik. *Kedua*, perempuan harus memiliki sumber daya manusia yang tinggi agar mampu bersaing dan memiliki potensi untuk juga dipilih menjadi wakil rakyat di parlemen. *Ketiga*, pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan

jangan hanya dibakal berkecimpung di dunia politik agar nantinya kuota 30% keterwakilan perempuan dapat terwujud di keanggotaan legislatif.

2. Masyarakat harus lebih terbuka terhadap perkembangan kualitas perempuan dan dapat menerima serta mendorong perempuan untuk ikut dalam kancah perpolitikan. Perempuan juga memiliki potensi untuk menyuarakan nasib rakyat diparlemen.

3. Parpol

Untuk parpol, agar dapat melaksanakan program yang telah direncanakan, dengan lebih memperhatikan pelaksanaannya dan hambatan-hambatan yang ditemui oleh kader perempuan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Acuan Buku

Al Rafni. 2006. *Buku Ajar Perspektif Gender*. Padang: UNP Press.

Ani Soetjipto” Perjuangan Politik perempuan: sebuah refleksi” harian Kompas.

Apria Wilda. 2005. *Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Padang.

Astrid Anugrah. 2009. *Keterwakilan Perempuan Dalam Politik*. Jakarta: Pancuran Alam.

A Widyani Soetjipto. 2005. *Politik Bukan Gerhana*. Esai-esai pilihan. Jakarta: Buku Kompas.

Hardiman, B. 1987. *Pendidikan Moral Sebagai Pendidikan Keadilan*. Yogyakarta: Basis”Andi Offset”

Hilmi Aminuddin. 2008. *Memperjuangkan Masyarakat Madani*. Jakarta: Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera.

Koirudin. 2004. *Partai Politik Dan Agenda Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Off Set.

Lexy J Maleong. 1998 *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya.

Lois P, Frankel. 2007. *See Jane Leat 99 Kiat Sukses Memimpin bagi Perempuan*. Jakarta: PT Pustaka utama.

Miriam Budiardjo. 2001. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Rini Soeroso, dkk. 2003. *Perempuan dan Politik*. Jakarta: Kementrian Pemberdayaan Perempuan.

Rudy May. 2007. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: PT Refika Aditama Bandung.

Shadia Marhaban dkk. 2009. *Panduan Pendidikan Politik Untuk Perempuan*. Yogyakarta: PT Geutamedia Meugah Asia.

Silvia Arizona. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gaya Media.